



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : 872/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor: 5244/KPG.02/Sekre tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Pengangkatan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 872/KPG.04.01/MUTASI/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLOONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDUK/UPTD
1	Siti Herdiani, A.K.S, MPSSp	19740525 199903 2 016	Pembina, IV/a	S2	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.219	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
2	Intan Indrasari S.Sos, MAP	19780524 200801 2 009	Penata, III/c	S2	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.219	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
3	Lisvanti, S.AP	19800705 200112 2 006	Penata, III/c	S2	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.219	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
4	Dena Roschana, S.E	19960210 202012 2 019	Penata Muda, III/a	S1	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.219	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
5	Achmad Saifurroddin	19750919 200901 1 001	Pengatur Tk I, II/d	SMA	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.65	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
6	Uen Uswendi	19700325 201506 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMA	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.65	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat
7	N. Hani Hamorah Marnaswanda, S.ST	19750501 199803 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.262	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
8	Fitri Sundari, S.E	19940318 202012 2 016	Penata Muda, III/a	S2	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 7.262	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
9	Yuyun Saproni, A.Md	19810620 201512 2 007	Pengatur Tk I, II/d	DBH Bahasa Inggris	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.314	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
10	Achmad Munandar	19630602 198903 1 003	Penata Muda Tk.I, III/b	SMA	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
11	Ruchiat	19640122 198803 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
12	Refli Mustafa Kamal	19781028 200901 1 002	Pengatur, II/c	SLTA	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat
13	Rudi Setiawan	19670814 200701 1 007	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMP	1 6 0 0 0 0 0 1 00 00 01 00 01 00 01 00 1 5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Sekretariat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDUK/UPTD
219	Susilawati, S.IP	19690330 199102 2 002	Penata , III/c	S1	1-6 0-0 0-0 01 08 00 01 00 00 01 03 00 1.6.242	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Seksi Pelayanan Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus
220	Kuraesin, S.IP	19740615 200801 2 003	Penata Muda, III/a	S1	1-6 0-0 0-0 01 08 00 01 00 00 01 03 00 1.6.246	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	Seksi Pelayanan Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus
221	Ruskata	19680321 201001 1 001	Pengatur, II/c	SMA	1-6 0-0 0-0 01 08 00 01 00 00 01 03 00 1.5.73	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Seksi Pelayanan Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus
222	Hendra Dhani, SE	19701005 201410 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1-6 0-0 0-0 01 08 00 01 00 00 01 03 00 1.5.73	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Seksi Pelayanan Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus
223	Keman Mulyadi	19700504 201410 1 001	Juru Muda Tk I, I/b	SD	1-6 0-0 0-0 01 08 00 01 00 00 01 03 00 1.5.73	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Seksi Pelayanan Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GOVERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

